



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025 merupakan tahun Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2025-2029. Dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur pencapaian program.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Tarempa, 30 Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik


Herry Fakhrizal, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308232003121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
D. Isu Strategis.....	8
E. Landasan Hukum	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis	11
B. Visi dan Misi.....	12
C. Tujuan dan Sasaran	12
D. Indikator Kinerja Utama.....	14
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	3
Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	4
Tabel 1.3 Sarana dan prasarana pendukung.....	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Strategis 2025-2029.....	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	16
Tabel 2.4 Program Tahun 2025.....	16
Tabel 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	18
Tabel 3.2 Kerangka Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran	18
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025	21
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	24
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja dan Standar Nasional	25
Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	29
Tabel 3.8 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Anamabas	7
Gambar 2 Pohon Kinerja	13
Gambar 3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 merupakan janji kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang dicapai akan menjadi tolak ukur atas pencapaian sasaran strategis periode 2025-2029. Keberhasilan capaian kinerja akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui proses reviu rencana strategis yang merupakan rekomendasi perencanaan menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator dan 2 (dua) Sasaran Strategis serta 2 (dua) Indikator sasaran yang diharapkan dapat menjawab permasalahan maupun isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan Urusan Pemerintahan umum yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada tahun 2025 Sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas;
2. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM;

Dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025 didukung dengan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 19 (sembilan belas) sub kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian target dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya serapan anggaran pada tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 5.631.685.915 atau 82,75% dari besaran pagu anggaran Rp. 6.805.742.012, hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sangat efisien yang terdiri belanja pegawai, barang dan jasa. Sedangkan Capaian kinerja yang capai pada tahun 2025 akan diuraikan pada laporan kinerja yang di awal dari rencana strategis, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, uraian capaian terukur dengan pengukuran jelas serta pencapaian rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 pada ayat (1) urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,

- keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja pada setiap akhir Tahun Anggaran, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sebagai alat mencapai misi, tujuan organisasi serta dalam perwujudan *good governance*.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat melalui rencana strategis dan rencana kerja menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan permasalahan sosial politik yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan demikian materi laporan menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik serta kegiatan strategis lainnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

B. Gambaran Umum

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas berada di bawah koordinasi dari Asisten Bidang Pemerintahan.

2. Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)

Komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Per 31 Desember 2025 berjumlah 39 (empat puluh) orang Aparatur Sipil Negara, dengan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Pegawai berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pegawai berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda IV.c	Eselon II.b	1 Orang
Pembina /IV.a	Eselon III.a	1 Orang
Pembina /IV.a	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I /III.d	Eselon III.b	1 Orang
Penata Tk. I /III.d	Eselon IV.a	1 Orang
Penata Tk. I /III.d	JF	5 Orang
Penata / III.c	JF	1 Orang

Golongan	Jabatan	Jumlah
Penata Muda TK. I / III.b	Staf	1 Orang
Penata Muda /III.a	Staf	2 Orang
Pengatur Tk. I /II.d	Staf	2 Orang
Pengatur / II.c	Staf	2 Orang
Golongan IX	Staf	13 Orang
Golongan VII	Staf	1 Orang
Golongan V	Staf	7 Orang
Jumlah		39 Orang

b. Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 1.2

Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan
ASN : 39 Orang	S2 : 2 Orang
	S1 : 25 Orang
	D3 : 1 Orang
	SMA/SMK : 11 Orang
Jumlah	39 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas poj dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan lebih optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia hasil perolehan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel. 1.3
Sarana dan prasarana pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Selain tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bakesbangpol;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Penegelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bakesbangpol; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

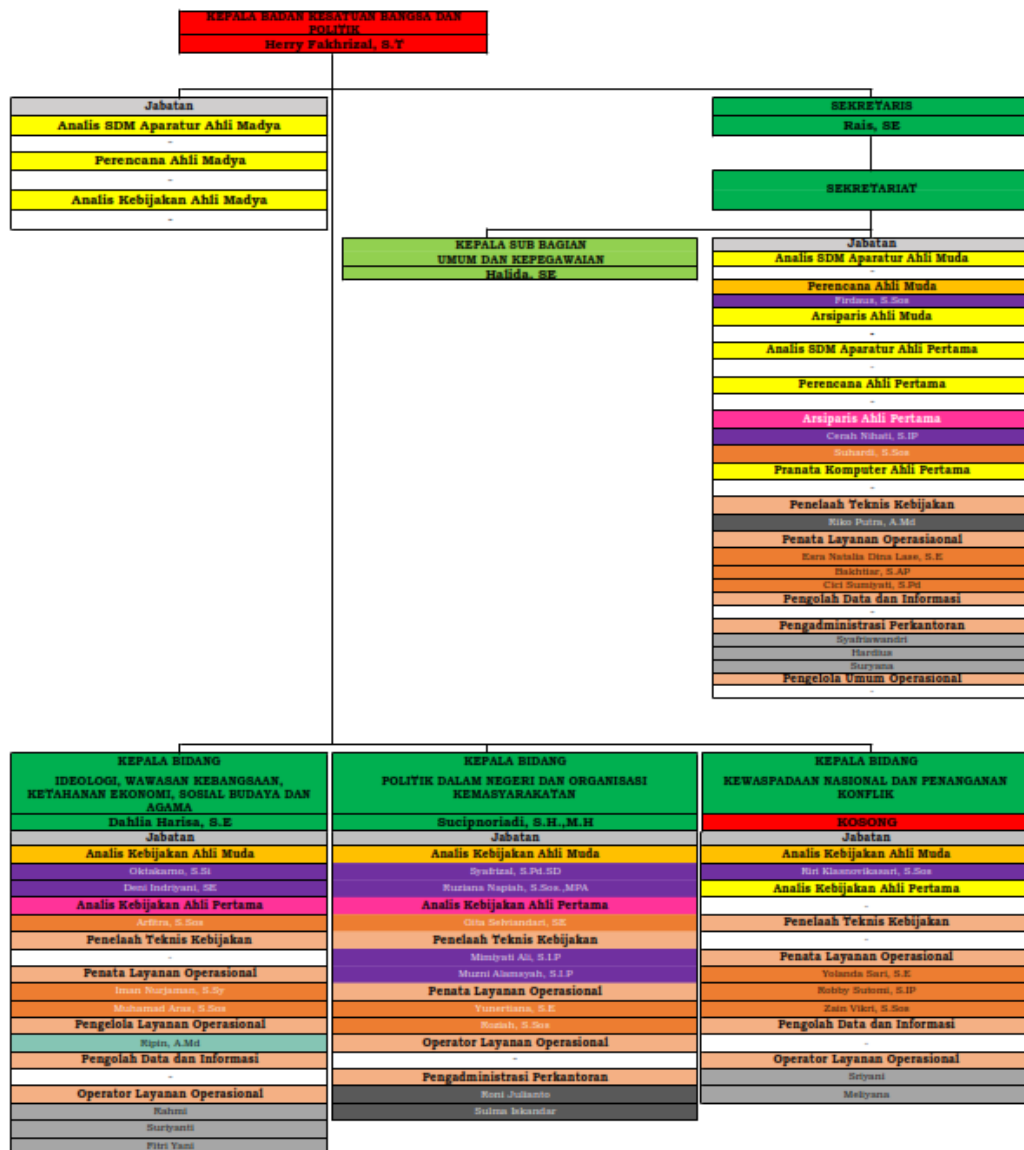
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Anamabas



■ Ekelon II
■ Ekelon III
■ Ekelon IV
■ Gol III
■ Gol II
■ PPPK Gol IX
■ PPPK Gol V
■ PPPK Gol VI

■ Ahli Madya
■ Ahli Muda
■ Ahli Pertama
■ Jabatan Pelaksana

■ JF Pertama dan Muda dan Madya yang belum terisi
■ JF Muda yang Terisi
■ JF Pertama yang Terisi

Tarempa, Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Herry Fakhrizal
Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308232003121004

D. Isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Bahwa bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan konflik sosial, budaya dan politik di daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya diantaranya kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang hukum. Hal ini merupakan hambatan yang berarti bagi terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Berdasarkan dinamika sosial politik yang terus berkembang di masyarakat pada umumnya, dan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada khususnya, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas sosial, memperkuat wawasan kebangsaan, dan mendorong harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan-tantangan ini menjadi semakin kompleks, mengingat adanya pengaruh dari perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta potensi konflik yang dapat muncul dari berbagai isu politik, sosial, dan budaya di tingkat lokal maupun nasional. Maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik dapat dirumuskan sebagai isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut :

1. Kondusifitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dan pembauran kebangsaan dalam menjaga ketahanan bangsa
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

E. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
8. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rrumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi ORMAS;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan sistematika pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Sub bab menguraikan gambaran umum, kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, SOTK, Isu Strategis, Landasa Hukum dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Sub bab ini menguraikan perencanaan strategis berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target indikator, perjanjian kinerja tahun 2025 dan indikator kinerja utama.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan tentang Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan perbandingannya serta Aspek Pendukung.

Bab 4 Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa rencana strategis periode 2025-2029 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi terhadap kesatuan bangsa dan politik yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 lima kedepan dengan melaksanakan urusan Pemerintahan Umum secara terencana, terarah dan terkoordinasi.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sosial, budaya, ekonomi, serta keberagaman di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan inklusif. Dalam Rencana strategis bertujuan menjawab isu-isu strategis dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Penetapan rencana strategis jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan yang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

B. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan memasuki periode pertama tahun 2025 berkonsisten melanjutkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu:

Kepulauan Anambas Yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul Di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju Dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi kepala daerah yang sudah ditetapkan dan berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik melaksanakan misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur.
2. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk menselaraskan tujuan dan sasaran kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029 yang terjabar pada misi ke 1 dan ke 3, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu rancangan rencana strategis 2025-2029 yang diimplepentasi dalam program dan kegiatan tahun 2025.

Selanjutnya tujuan dan sasaran strategis tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana strategis tahun 2025– 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi
2. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, dapat dilihat pada gambar pohon kinerja pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambar 2 Pohon Kinerja

Sasaran RPJMD /Indikator	Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)					
	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel Indikator : Nilai SAKP					
Tujuan /Indikator	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel Indikator : Predikat AKIP					
	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun Indikator : Indeks Kerukunan Umat Beragama					
Sasaran /Indikator	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Indikator : Nilai AKIP					
	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indikator : Indeks Harmoni Indonesia					
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Selanjutnya untuk lebih jelas Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kinerja dalam periode 2025-2029 dapat disajikan pada tabel dibawahnya.

Tabel. 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Strategis 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	76,00	
Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun		Indeks Kerukunan Umat Beragama	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99	
	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00	65,00	67,50	67,50	67,50	67,50	

D. Indikator Kinerja Utama

Menurujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Selanjutnya dalam upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama periode 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan dan Politik Nomor 11/BAKESBANGPOL/10/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel. 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	Nilai	Upaya Peningkatan AKIP dan Reformasi Birokrasi serta pelayanan masyarakat		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	Nilai		Nilai hasil LHE Inspektorat		
2.	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	untuk mengukur dan memantau tingkat keharmonisan sosial masyarakat Indonesia dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, budaya, agama)		FKUB	Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan, agama, pembauran kebangsaan serta politik di daerah upaya pencegahan dini konflik sosial
		Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks		Hasil pengukuran dan laporan lhal Provinsi /Kabupaten/Kota		

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan sebuah tekad yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebagai kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan wahana proses tentang perspektif kinerja yang ingin dihasilkan pada tahun 2025. Perencanaan kinerja juga disusun akan berguna untuk mendukung rencana kerja pemerintah daerah dengan melakukan penyusunan prioritas kegiatan dan porsi anggaran yang terbatas diharapkan dapat mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan mencapai sasaran lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029, selanjutnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Seperti sudah dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Perjanjian Kinerja 2025 yang pada umumnya yang sudah ditetapkan dan selaras dengan rencana strategis. Berikut perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	62,50
2	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00

Dengan perjanjian kinerja pada tahun 2025 diharapkan pemanfaatan anggaran lebih terarah dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada sasaran strategis serta indikator kinerja yang ingin di capai pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada perubahan tahun 2025 melaksanakan secara utuh sebanyak 5 Program dan 9 kegiatan 19 Sub Kegiatan. Berikut ini tabel jumlah program dan total pagu anggran awal dan pergeseran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran	
		Awal	Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.007.677.758	4.732.336.484
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.403.983.449	1.139.363.748
3.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	259.891.870	119.393.944
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	442.071.589	488.058.589
5.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	428.611.520	326.589.247
Jumlah		7.542.236.186	6.805.742.012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dalam menunjang visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berkaitan dibidang kesatuan bangsa dan politik menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas kepada pimpinan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kerangka Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1.	Sangat Baik	> 90	Merah
2.	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3.	Cukup	65.00 – 74.99	Biru
4.	Kurang	50.00 – 64.99	Biru
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	Biru

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029.

Sesuai dengan ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Selanjutnya Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditetapkan terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan upaya untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, meliputi:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas
2. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut adalah:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian

Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Keterangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	62,50	71,50	114,4	Sangat Baik
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00	-	-	Sangat Kurang
Rata-rata capaian sasaran strategis				57,20	Kurang

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 pada indikator nilai SAKIP 114,4, realisasi melebihi target yaitu target 62,50 dan realisasi 71,50 dengan prediket sangat baik. Sedangkan Indikator Indeks Harmoni Indonesia, berdasarkan survey indeks harmoni indonesia di provinsi kepulauan riau tahun 2025 tidak memperoleh nilai dikarenakan kabupaten kepulauan anambas tidak memenuhi target server responden. Sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 53,36 persen atau kategory kurang.

2. Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 telah memasuki periode rencana strategis 2025- 2029 yang sebelumnya merupakan periode 2021-2026 sehingga terdapat perubahan perubahan tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja. Realisasi dan capaian kinerja samapai dengan tahun 2025 terhadap tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025

RENSTRA 2021-2026											
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi					Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan	Nilai SAKIP	60,76	64,8	67,3	64,8		97,22	96,72	96,83	90,00	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,56	90,74	81,86	87,30		108,96	118,12	105,69	112,28	
Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	0	0	0	0		200,00	200,00	200,00	200,00	
Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan ewaspadaan dini	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	519	363	831	843		186,69	121,00	275,17	268,47	
RENSTRA 2025-2029											
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP					71,50					114,4
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia					-					-

Berdasarkan tabel diatas, pada periode rencana strategis 2021-2026 pelaksanaannya sampai 2024 dan dilanjutkan periode rencana strategis 2025-2029 sehingga pengukuran kinerja sampai dengan 2025.

a. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas

Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP perangkat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) diketahui nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dengan nilai 71,50, menunjukkan kenaikan tren realisasi kinerja dan capaian kinerja yaitu 114,4 dibandingkan capaian pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sudah melampaui target pada perjanjian kinerja dan akan terus ditingkat dalam hal:

- 1) Perencanaan kinerja
- 2) Pengukuran kinerja
- 3) Pelaporan kinerja
- 4) dan evaluasi kinerja.

b. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Indikator Kinerja : Indeks Harmoni Indonesia, untuk tahun pertama pada periode rencana strategis belum diperoleh nilai dikarenakan jumlah responden untuk memenuhi target survey indeks harmoni indonesia sama dengan atau lebih dari 1.250 orang dengan untuk tahun 2025 responden Kabupaten Kepulauan Anambas hanya 349 orang.

Indeks harmoni Indonesia mengukur tingkat keharmonisan kehidupan bermasyarakat melalui 4 dimensi utama dan beberapa indikator persepsi masyarakat yaitu:

1). Harmoni Sosial

Menggambarkan kualitas hubungan antarwarga dalam kehidupan sehari-hari, dengan inikator:

- Toleransi antar kelompok (suku, agama, ras, golongan)
- Rasa saling percaya antarwarga
- Solidaritas dan gotong royong

- Penyelesaian konflik secara damai
 - Rasa aman dan nyaman hidup bermasyarakat
- 2). Harmoni Ekonomi
- Mengukur keadilan dan keharmonisan dalam aspek ekonomi, dengan indikator:
- Kesempatan kerja yang adil
 - Akses ekonomi yang setara
 - Minimnya kecemburuan sosial
 - Kerja sama ekonomi antarwarga
 - Persepsi kesejahteraan bersama
- 3). Harmoni Budaya
- Menilai penerimaan dan pelestarian keberagaman budaya, dengan indikator:
- Penghargaan terhadap adat dan budaya lokal
 - Penerimaan terhadap budaya lain
 - Partisipasi dalam kegiatan budaya
 - Tidak adanya diskriminasi budaya
 - Kehidupan multikultural yang damai
- 4). Harmoni Keberagamaan (Religius)
- Mengukur kerukunan hidup antarumat beragama, dengan indikator:
- Toleransi beragama
 - Kebebasan menjalankan ibadah
 - Hubungan antarumat beragama
 - Peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan
 - Minimnya konflik berlatar agama

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rancangan Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah membanding realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis dari periode rencana strategis 2021-2026

dan periode 2025-2029 termasuk di dalamnya realisasi kinerja tujuan dan sasaran serta indikator kinerja.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah pada periode rencana strategis, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

RENSTRA 2021-2026									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA	Realisasi				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi	75,00	59,64	60,92	0	75,47	
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan	Nilai SAKIP	77,50	60,76	64,8	67,3	64,8	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	83,56	90,74	81,86	87,30	
2	Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		Jumlah Konflik Sosial di Daerah	1 Kasus	0	0	0	0	
		Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	1 Kasus	0	0	0	0	
		Meningkatnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini	Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	326 Orang	519	363	831	843	
RENSTRA 2025-2029									
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	BB					BB
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	76					71,50
4	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun		Indeks Kerukunan Umat Beragama	90,99					-
		Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan	Indeks Harmoni Indonesia	67,5					-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Analisa berikutnya adalah mengukur capaian kinerja sasaran dengan membanding realisasi kinerja indikator sasaran 2025-2029 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dengan target dan realisasi Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional sebaga berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	STANDAR NASIONAL	
			2025	Target 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	71,50	-	-
2	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat dibanding dengan standar nasional hal ini di karenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan Politik tidak melaksanakan urusan wajib atau melaksanakan standar pelayanan minimal ataupun standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sampai tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun

berikutnya. Adapun keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**” dengan indikator “Predikat AKIP” pada tahun 2025 dengan capaian prediket **BB** atau sangat baik, melampaui target yaitu prediket **B** pada melalui dukungan pencapaian kinerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

Sasaran 1 **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas** dengan indikator Nilai AKIP. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui inspektorat telah melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP). Evaluasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh perangkat daerah terhadap pada lima komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh nilai 71,50 dengan prediket sangat baik. Nilai tersebut akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada tahun 2025 serta membandingkan capaian nilai tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Gambar 3

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	15,00	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			64,80	71,50
			B	BB

Pada tabel diatas menunjukkan prestasi yang diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat tren peningkatan pada tahun

2025 terhadap pelaporan kinerja dari tahun 2024. Peningkatan tersebut tidak serta merta begitu saja melainkan usaha dan kerja keras bersama seluruh pihak.

Faktor penyebab keberhasilan peningkatan akuntabilitas didorong adanya bentuk tanggung jawab yang kuat dalam penataan layanan pemerintah seperti:

- a. Komitmen pimpinan dalam mengawal capaian kinerja
- b. Sistem monitoring dan evaluasi rutin
- c. Kejelasan Sasaran kinerja (target)
- d. Pemanfaatan teknologi informasi membantu efisiensi perencanaan hingga evaluasi kinerja
- e. Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan pengawasan

Tujuan 2 “Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun” dengan Indikator “Indeks Kerukunan Umat Beragama”. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran kuantitatif untuk menilai kualitas hubungan antar pemeluk agama di masyarakat. Survei dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mengukur sejauh mana umat beragama di Indonesia hidup secara toleran, setara, dan bersatu dalam kehidupan bersama melalui 3 indikator utama, yaitu:

- a. Toleransi yaitu kemampuan menerima dan menghormati perbedaan keyakinan antar agama.
- b. Kesetaraan yaitu kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
- c. Kebersamaan yaitu kerjasama nyata antar kelompok agama untuk kesejahteraan.

Pelaksanaan survei indeks kerukunan umat beragama tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan secara khusus, hanya sebagai sample ditingkat kabupaten/kota di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran 2 “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM” dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia. Berdasarkan survei indeks harmoni

Indonesia provinsi Kepulauan Riau oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2025 bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memenuhi target survey responden hanya 349 responden. Sedangkan target survey dengan jumlah responden sama dengan atau lebih dari 1,250 orang, sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memperoleh skor indeks harmoni Indonesia.

Untuk pelaksanaan capaian kinerja tahun selanjutnya pada tujuan 2 dengan indikator indeks kerukunan umat beragama akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian agama provinsi Kepulauan Riau agar Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki skor indeks kerukunan umat beragama untuk tahun kedepan. Sedangkan untuk sasaran 2 dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia, akan berkoordinasi dengan tim survey dan mensosialisasikan survey Indeks Harmoni Indonesia kepada masyarakat serta berkoordinasi bagian perencanaan pemerintah daerah terkait permasalahan tersebut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan politik dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditargetkan. Adapun sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai target sasaran strategis adalah sumber daya manusia dan anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efektifitas
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	62,50	71,50	114,4	4.732.336.484	4.062.471.373	85,84	133,26
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65	0	0	2.073.405.528	1.569.214.542	75,68	0,00
Rata-Rata Capaian				57,20	6.805.742.012	5.631.685.915	80,76	

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, secara umum dapat dilihat sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana. Hal ini dilakukan selain upaya penggunaan tepat sasaran dan juga adanya kebijakan nasional maupun daerah untuk pembatasan belanja yang bersifat ceremonial. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar 57,20 persen, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator Nilai AKIP capaian kinerja 114,4 persen, hal menunjukkan capaian kinerja yang ditarget melampaui sedang persentase capaian serapan anggaran 85,84 persen hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran serta efektifitas penggunaan anggaran yang baik terhadap pencapaian kinerja. Dengan kata lain efisiensi anggaran tidak berdampak langsung dalam pencapaian kinerja, dan untuk tahun mendapat capaian kinerja dan realisasi anggaran akan lebih di tingkatkan.
2. Indikator Indeks Harmoni Indonesia capai kinerja nol, sedangkan serapan anggaran 75,68 persen dengan efektifitas capai nol. Hal ini disebabkan karna jumlah respon survey Indeks harmoni Indonesia tidak memenuhi target respon yang telah di tetapkan. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia nomor: 400.4.7/e-5/Polpum tanggal 1 Oktober 2025 Hal penyampaian laporan hasil Indeks Harmoni Indonesia (IhaI) tahun 2025 sebagai pelaksana survei yang di tujukan kepda Gubernur Kepulauan Riau bahwa pelaksanaan survey tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memenuhi target survey respon. Sedangkan target target survey jumlah respon sama dengan atau lebih dari 1.250 orang.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada tahun 2025 telah merencanakan program yang mendukung pencapaian indikator utama. Rencana program dan indikator yang telah di rumuskan dalam rencana strategis 2025-2029 selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut ini realisasi kinerja program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 3.8

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	114,4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69	90,60	118,14
				Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	90%	100%	111,11
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	0	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100,00
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100,00
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	85%	85%	100,00
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	81,58%	80%	98,06
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang diselesaikan	83%	100%	120,48

a. Penjelasan program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Indikator Nilai AKIP dengan target nilai 62,50. Pada tahun 2025 telah berhasil mencapai 71,50 dengan prediket sangat baik, indikator ini telaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Melalui program tersebut di arahkan pemenuhan kebutuhan operasional dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan capaian indikator kinerja program yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditarget 76,69 dapat terealisasi 90,60 atau mutu unit layanan A dengan Predikat Sangat Baik. Selanjutnya indikator Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 90% terealisasi 100%.

Dalam upaya meningkat kualitas pelayanan agar terciptanya good govenance, beberapa hal yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- 1). Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan serta kebijakan lainnya searah tujuan organisasi dan rencana kerja pemerintah daerah dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- 2). Melakukan Evaluasi Kinerja secara berkala setelah ditetapkan perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja terhadap target target kinerja.
- 3). Memberikan informasi dan pelayanan serta kegiatan pada aplikasi pejabat pengelola informasi daerah (PPID)
- 4). Memanfat aplikasi ASIS untuk pelaporan kinerja dan kehadiran ASN setiap hari.
- 5). Penerapan reward dan punishment dalam meingkatkan motivasi kinerja yang efektif dan efisien serta disiplin pada

jam kerja berupa Tambahan Penghasilan Pegawai serta penghargaan.

Sasaran 2 : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia. Seperti diuraikan di atas bahwa indikator tersebut tidak diperoleh nilai atau nol berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pelaksana survey. Pada tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan rencana strategis jadi untuk mewujudkan sasaran 2 didukung beberapa program yang berkaitan langsung dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM sebagai berikut:

- 1). Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Indikator Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, realisasi 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Output kinerja yang dihasil Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 30 orang dan Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 26 orang. Walaupun terdapat efisiensi anggaran, kinerja tetap tercapai sedangkan efisiensi terjadi silpa belanja dan tidak terealiasinya belanja pakaian dinas lapangan.
- 2). Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Indikator Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan. Output kegiatan Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terealisasi 1 Dokumen dan Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 31 orang. Sedangkan efisiensi terjadi karena tidak tersalurnya bantuan hibah FKUB.

- 3). Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Persentase pendidikan politik pada kader partai politik, terealisasi 100%. Output kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebanyak 330 orang dan penyaluran dana hibah partai politik sebanyak 11 partai.
- 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dengan capaian realisasi 98,06 persen. Output kegiatan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi jumlah ormas ada sebanyak 40 orang, 32 ormas diantaranya sudah terdaftar (aktif) dan 8 ormas lainnya masih dalam proses pendaftaran.

- 5). Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase konflik yang diselesaikan. Realisasi capaian 100% dengan kata lain tidak terjadi konflik. Pada tahun 2025 berdasarkan laporan terdapat 4 kasus gangguan dan potensi konflik yang terjadi dikabupaten. Kinerja kegiatan Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota teralisasi 1 kali. Efisiensi terjadi pelaksanaan kegiatan hanya 1 kali dari target 2 kali dan juga berdasarkan surat edaran Bupati Kepulauan Anambas nomor 55 Tahun 2025 tentang Penghentian Kegiatan Akhir Tahun 2025.

b. Rencana Tindak Lanjut/Upaya Perbaikan

Berdasar realisasi sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik masih terdapat satu tujuan dan sasaran yang belum terealisasi yaitu indeks kerukunan umat beragama, pelaksanaan survernya dari Kementerian Agama dan indeks harmoni indonesia pelaksanaan survey dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sedang program pendukung tetap terlaksana sesuai dengan target indikator dan anggaran yang diberikan. Untuk itu pada tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi dengan perbaikan:

- 1). Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Kegiatan Pembentukan Paskinraka dan Purnapaskibraka perlu dilaksanakan lebih baik lagi dan profesional dalam hal Pembinaan, pendanaan dan perekrutan peserta. Kegiatan ini sangat penting untuk terus diselenggarakan karena bermanfaat untuk mendidik generasi muda agar lebih disiplin, paham akan wawasan kebangsaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.
 - Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam program dan kegiatan melalui wadah komunikasi,

- konsultasi, dan kerja sama antarwarga dari berbagai etnis, suku, dan budaya. bertujuan mencegah konflik SARA, memperkuat integrasi sosial, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.
- 2). Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan.
- Perlu dilakukan upaya kreatif dan peningkatan peran forum Kerukunan Umat Beragama dalam memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama antar kelompok masyarakat baik antar suku, agama, golongan, dan ras.
 - Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi yang mengatur persyaratan dan tata cara pendirian tempat ibadah guna menghindari terjadinya konflik.
 - Perlunya dilakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai narkoba, meliputi jenis, dampak, bahaya penyalahgunaan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya, guna meningkatkan kesadaran dan membentuk perilaku hidup sehat serta bebas narkoba.
 - Perlunya koordinasi dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Bergama untuk mengukur dan memantau tingkat kerukunan antarumat beragama dan Indeks Harmoni Indonsia di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 3). Persentase pendidikan politik pada kader partai politik.
- Perlunya peningkatan kegiatan penguatan pendidikan politik kepada kader partai politik dan unsur masyarakat khususnya generasi muda.

- Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) partai politik terhadap bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan peningkatan kapasitas.
- 4). Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif.
- Perlu lebih ditingkatkan kegiatan pengawasan terhadap seluruh ormas yang ada dengan melakukan pendataan untuk yang masih aktif diupayakan dilakukan sosialisasi dan monitoring agar bisa melakukan pendaftaran Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Surat Keterangan Teregistrasi (SKT).
- 5). Persentase konflik yang diselesaikan.
- Perlunya peningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, penanganan konflik dan pendidikan wawasan kebangsaan guna meminimalisir adanya konflik di masyarakat.
 - Peningkatan kemampuan pendalaman, analisa dan pelaporan intelijen untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 serapan anggaran mencapai 82,75 persen atau sebesar 5.631.685.915,00 dari total anggaran 6.805.742.012,00. Adapaun anggaran dan realisasi serta aspek pendukung yang tersedia digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.732.336.484,00	4.062.471.373,00	85,84
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.116.534.366,00	3.498.618.245,00	84,99
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.714.366,00	3.363.428.245,00	84,56
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.820.000,00	135.190.000,00	97,39
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.166.000,00	19.166.000,00	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.166.000,00	19.166.000,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.632.880,00	213.256.474,00	84,41
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.900.320,00	25.787.000,00	99,56
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.626.396,00	8.427.000,00	61,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.311.600,00	46.920.000,00	88,01
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.170.600,00	1.130.000,00	35,64
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.623.964,00	130.992.474,00	83,64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.369.599,94	280.955.240,00	98,80
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.700.000,00	109.700.000,00	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.669.599,94	171.255.240,00	98,05
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.633.638,06	50.475.414,00	84,64
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.907.624,06	10.749.400,00	54,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.376.014,00	38.376.014,00	100,00
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.139.363.748,00	913.888.226,00	80,21
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.139.363.748,00	913.888.226,00	80,21
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	127.384.626,00	48.184.626,00	37,83

	Pembentukan Paskibraka	1.011.979.122,00	865.703.600,00	85,55
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	488.058.589,00	488.058.589,00	100,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	488.058.589,00	488.058.589,00	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	427.507.589,00	427.507.589,00	100,00
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	60.551.000,00	60.551.000,00	100,00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	0	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	0	0
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	119.393.944,00	7.150.000,00	5,99
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	119.393.944,00	7.150.000,00	5,99
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.393.944,00	7.150.000,00	18,15
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah	80.000.000,00	-	-
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWAS PADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	326.589.247,00	160.117.727,00	49,03
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewas padaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	326.589.247,00	160.117.727,00	49,03
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	326.589.247,00	160.117.727,00	49,03
	Jumlah	6.805.742.012,00	5.631.685.915,00	82,75

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa program yang memiliki serapan tertinggi adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 100 persen. Hal ini dapat tercapai karena perencanaan dan penganggaran yang tepat serta kerjasama yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan program yang memiliki serapan anggaran paling rendah adalah Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya sebesar 5,99 persen yaitu terjadinya efisiensi anggaran sehingga tidak dilaksanakan kegiatan rakor FKUB pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan penyaluran dana Hibah untuk FKUB pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk menggambarkan perencanaan, langkah-langkah pencapaian sasaran dan target pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 pada urusan Pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) sasaran kinerja yang belum terealisasi yaitu Indeks Harmoni Indonesia, indikator ini merupakan survey indeks harmoni Indonesia dapat diperoleh jika target responden survey memenuhi target telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu 1.250 responden. Berangkat dari capaian tahun 2025 dengan harapan pada tahun selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan lebih fokus pada pelaksanaan program guna untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditargetkan serta berkoordinasi lebih intens kepada pihak terkait dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mendukung pencapaian kinerja terutama pihak vertikal, forum dan lembaga masyarakat serta masyarakat secara umumnya. Kami menyadari masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 serta penyampaian laporan kinerja, untuk itu diharapkan saran dan sumbangan pikiran agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja tahun selanjutnya lebih baik.

Terempa, 30 Januari 2026

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik



Herry Fakhrizal, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308232003121004

LAMPIRAN

Jumlah Ormas Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas

Organisasi Kemasyarakatan Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

NO	KECAMATAN	TERDAFTAR	DALAM PROSES	JUMLAH
1	Kecamatan Siantan	16	3	19
2	Kecamatan Siantan Selatan	6	0	6
3	Kecamatan Palmatak	1	1	2
4	Kecamatan Kute Siantan	2	0	2
5	Kecamatan Jemaja	4	3	7
6	Kecamatan Jemaja Barat	1	0	1
7	Kecamatan Jemaja Timur	2	1	3
Total		32	8	40

Partai Politik dan Porolehan Suara Hasil Pemilu 2024

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2024	Besarnya Bantuan Keuangan Yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi periode 2024-2029	
			Nilai Suara Sah	Jumlah
1.	Partai PKB	1.199	15.861	19.017.339
2.	Partai Gerindra	2.115	15.861	33.546.015
3.	Partai PDI-P	3.078	15.861	48.820.158
4.	Partai Golkar	2.861	15.861	45.378.321
5.	Partai Nasdem	2.349	15.861	37.257.489
6.	Partai PKS	1.342	15.861	21.285.462
7.	Partai PAN	1.922	15.861	30.484.842
8.	Partai PBB	1.978	15.861	31.373.058
9.	Partai Demokrat	2.855	15.861	45.283.155
10.	Partai Perindo	819	15.861	12.990.159
11.	Partai PPP	5.931	15.861	94.071.591
Total		26.449		419.507.589

**REKAPITULASI RUMAH IBADAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO.	KECAMATAN	MASJID	MUSHOLLA/ SURAU	GEREJA PROTESTAN	GEREJA KHATOLIK	FURA	VIHARA	KELENTENG	JUMLAH
1	SIANTAN	18	14	2	1	0	1	0	36
2	SIANTAN SELATAN	14	5	1	1	0	0	0	21
3	SIANTAN TIMUR	15	4	0	0	0	0	0	19
4	SIANTAN TENGAH	6	1	0	1	0	1	0	9
5	PALMATAK	10	7	1	0	0	0	0	18
6	KUTE SIANTAN	6	7	0	0	0	0	0	13
7	SIANTAN UTARA	6	1	0	0	0	0	0	7
8	JEMAJA	12	8	0	0	0	0	0	20
9	JEMAJA TIMUR	6	6	0	0	0	0	0	12
10	JEMAJA BARAT	3	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL		96	53	4	3	0	2	0	158



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RAIS, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004

Pihak Pertama

RAIS, SE
NIP 197909122010011013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai AKIP	62,50
2	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	65,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.732.336.484,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.139.363.748,00
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	119.393.944,00
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	488.058.589,00
5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	326.589.247,00
	TOTAL	6.805.742.012,00

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua


ANENG

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 19730823 200312 1 004

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Persen	62,50				62,50	4.732.336.484
2.	Meningkatnya Stabilitas Sosial dan Kehidupan Beragama yang Rukun	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	Persen	65,00				65,00	2.073.405.528

Pihak Kedua


Aneng

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama


Herry Fakhrizal, S.T
NIP 197308232003121004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANENG
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua


ANENG

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69
		Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	90%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.166.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.116.534.366	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.632.880	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.369.599,94	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.633.638,06	
Jumlah		4.732.336.484	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004

Pihak Pertama



RAIS, SE
NIP 197909122010011013

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,69				76,69	4.732.336.484
			Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	90%	22,5	45,0	67,5	90,0	

Pihak Kedua



HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



RAIS, SE
NIP 197909122010011013



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FIRDAUS, S. Sos

Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAIS, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

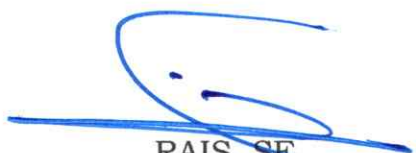
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.


Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua


RAIS, SE
NIP 197909122010011013

Pihak Pertama


FIRDAUS, S. Sos
NIP 198001202009031001

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	
Jumlah		0	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



RAIS, SE

NIP 197909122010011013

Pihak Pertama



FIRDAUS, S. Sos

NIP 198001202009031001

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Perencana Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1			1	1	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1				1	

Pihak Kedua



RAIS, SE
NIP 197909122010011013

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



FIRDAUS, S. Sos
NIP 198001202009031001



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HALIDA, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAIS, SE

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua


RAIS, SE
NIP 197909122010011013

Pihak Pertama


HALIDA, SE
NIP 197712252010012009

PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A	Terlaksananya pengelolaan dan pencatatan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan sesuai ketentuan	100%
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
B	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	100%
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
C	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran	100%
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
D	Tersedianya Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, serta Gedung Kantor/Bangunan untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
E	Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	100%
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		APBD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.166.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.977.714.366	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.820.000	
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.669.599,94	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.700.000,00	
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.907.624,06	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.376.014	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.350.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.626.396	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.311.600	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.623.964	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.170.600	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.900.320	
		4.732.336.484	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



RAIS, SE

NIP 197909122010011013

Pihak Pertama



HALIDA, SE

NIP 197712252010012009

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	3	6	9	12	19.166.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34	34	34	34	3.977.714.366
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12	138.820.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	174.669.599,94
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	-	6	6	6	109.700.000,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	6	9	12	19.907.624,06
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	6	9	12	38.376.014
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	6	9	12	1.350.000

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	-	1	2	3	13.626.396
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	1	2	3	4	53.311.600
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	-	1	-	2	156.623.964
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	-	1	1	1	3.170.600
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	-	1	2	3	25.900.320

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



RAIS, SE
NIP 197909122010011013

Pihak Pertama



HALIDA, SE
NIP 197712252010012009



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Bidang Polittk Dalam Negeri Dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004


SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	85%
2	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	81,58%
3	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik yang diselesaikan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	427.507.589	
B	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	
C	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	326.589.247	
Jumlah		754.096.836	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308201003121004


SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan


No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	85		40	60	85	427.507.589
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	81,58	10	40	60	81,58	0
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	100		50	-	100	326.589.247

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
 NIP 197308232003121004


SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
 NIP 198111252006041018

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0 Orang
1	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		APBD
1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	326.589.247	
Jumlah		326.589.247	

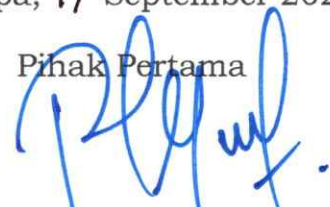
Pihak Kedua



SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



RIRI KLASNOVIKASARI, S.Sos
NIP 198611042010012014



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RIRI KLASNOVIKASARI, S.Sos

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIPNORIADI, S.H.,M.H

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

Pihak Pertama

RIRI KLASNOVIKASARI, S.Sos
NIP 198611042010012014

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	1	1	2	326.589.247

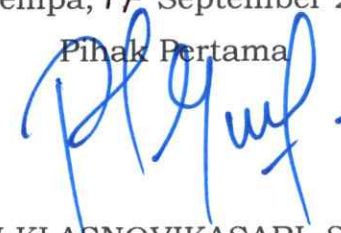
Pihak Kedua



SUCIPNORIADI, S.H., M.H
NIP 198111252006041018

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



RIRI KLASNOVIKASARI, S.Sos
NIP 198611042010012014



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SYAFRIZAL, S.Pd SD
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

SYAFRIZAL, S.Pd SD
NIP 197107051993041001

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	330	50	250	300	330	427.507.589

Pihak Kedua



SUCIPNORIADI, S.H., M.H
NIP 198111252006041018

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



SYAFRIZAL, S.Pd SD
NIP 197107061993041001

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	330 Orang
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	330 Orang

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		APBD
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	427.507.589	
Jumlah		427.507.589	

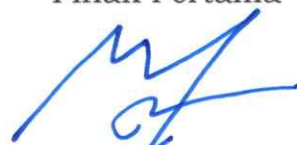
Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

Pihak Pertama



SYAFRIZAL, S.Pd SD
NIP 197107051993041001



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUCIPNORIADI, S.H.,M.H

Jabatan : Kepala Bidang Poltik Dalam Negeri Dan Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA
NIP 198602082010012009

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 Laporan
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		APBD
1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0	
Jumlah		0	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018



RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA
NIP 198602082010012009

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	-	-	-	1	0

Pihak Kedua



SUCIPNORIADI, S.H.,M.H
NIP 198111252006041018

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA
NIP 198602082010012009



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DAHLIA HARISA, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan,
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004


DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
2	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	85%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		APBD
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.139.363.748	
B	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	119.393.944	
C	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	60.551.000	
Jumlah		1.319.308.692	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
 NIP 197308232003121004


DAHLIA HARISA, S.E
 NIP 197211082002122006

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	25	50	75	100	1.139.363.748
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	100	25	50	75	100	119.393.944
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Laporan	1	-	-	1		60.551.000

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


HERRY FAKHRIZAL, S.T
NIP 197308232003121004


DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DENI INDRIYANI, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAHLIA HARISA, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006

DENI INDRIYANI, SE
NIP 198111292012122001

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Terlaksananya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	58 Orang
1	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang
2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	26 Orang
B	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilahan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang
1	Terlaksananya penugasan paskibra	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka	1 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		APBD
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	127.384.626	
2	Pembentukan Paskibraka	1.011.979.122	
B	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Pelaksanaan tugas Paskibraka	60.551.000	
Jumlah		1.199.914.748	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua


DAHLIA HARISA, S.E
 NIP 197211082002122006

Pihak Pertama


DENI INDRIYANI, SE
 NIP 198111292012122001

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	30	-	30	30	30	127.384.626
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	26	-	-	26	26	1.011.979.122
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya penugasan paskibra	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan tugas paskibraka							

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Pertama



DENI INDRIYANI, SE
NIP 198111292012122001

Pihak Kedua



DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006



PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : OKTAKARNO, S.Si
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAHLIA HARISA, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006

Pihak Pertama

OKTAKARNO, S.Si
NIP 198210242011011001

**PERUBAHAN TURUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Terselenggaranya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang diikuti oleh peserta	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	31 Orang
1	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen
2	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 Orang

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
A.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		APBD
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.393.944	
2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80.000.000	
Jumlah		119.393.944	

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006

OKTAKARNO, S.Si
NIP 198210242011011001

**PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025**

Nama Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

No	Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Rencana Pencapaian				Anggaran (Rp)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	39.393.944
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	31	-	31	31	31	80.000.000

Tarempa, 17 September 2025

Pihak Kedua



DAHLIA HARISA, S.E
NIP 197211082002122006

Pihak Pertama



OKTAKARNO, S.Si
NIP 198210242011011001